

OPTIMALISASI PEMBINAAN MENTAL FUNGSI KOMANDO DALAM MENDUKUNG PENCEGAHAN PAHAM RADIKALISME DI KOMANDO LINTAS LAUT MILITER JAKARTA

OPTIMIZATION OF MENTAL DEVELOPMENT OF COMMANDO FUNCTION TO SUPPORT THE PREVENTION OF RADICALISM UNDERSTANDING IN THE MILITARY SEA CROSS COMMAND JAKARTA

Uus Rohimat¹, R.A Mulyadi², Ansori³

Universitas Pertahanan
(uusrohimat74@gmail.com)

Abstrak - Pembinaan mental TNI AL merupakan bagian dari pembinaan personil TNI AL dengan fungsi dan tugas membina sikap dan mental personil TNI AL, isu yang berkembang saat ini menurut Menteri Pertahanan RI Jenderal TNI (Purn) Ryamizard Ryacudu ada indikasi dan kekhawatiran terpaparnya para prajurit TNI oleh pemahaman radikalisme, dikatakan menteri pertahanan RI disela acara Halal Bihalal di Gor Achmad Yani Markas Besar TNI Jakarta 3% prajurit TNI terpapar paham radikalisme. Tentara Nasional Indonesia yaitu sebagai pejuang prajurit dan prajurit pejuang. Keberhasilan dalam melaksanakan tugas pokok secara optimal baik itu bersifat Operasi Militer Perang/Operasi Militer Selain Perang. Doktor Abdul Azis Al Quusy menyebutkan mental adalah panduan secara menyeluruh antara berbagai fungsi dengan kemampuan menghadapi krisis yang menimpa kepada manusia yang dapat berpengaruh terhadap emosi dan psikologis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi bintal dan faktor pendukung dan penghambat dalam pembinaan bintal fungsi komando yang dilaksanakan di satuan kolinlamil Jakarta, serta merumuskan model terbaik bintal fungsi komando yang dilaksanakan di pendirat maupun di KRI dalam mendukung pencegahan paham radikalisme. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif menggambarkan kondisi mental prajurit agar terhindar dari paham radikalisme dengan lokus komando lintas laut militer Jakarta dengan. Dari Penelitian ini didapatkan bahwa faktor penghambat adalah kurangnya minat dari prajurit dalam kegiatan pembinaan mental fungsi komando, kurangnya minat prajurit dalam mengikuti penataran pembinaan mental fungsi komando yang di selenggarakan oleh pusbintal TNI, kurangnya personel pengawak Bintal di satuan baik di pendirat maupun di unsur KRI, adapun strategi yang harus dilakukan adalah mensosialisasikan kembali tentang pentingnya pembinaan mental fungsi komando di satuan dengan peran para komandan satuan, para kasatker dalam pembinaan mental rohani, ideologi dan tradisi kejuangan, mengikutsertakan para komandan satuan atau kasatker dalam penataran bintal fungsi komando yang di selenggarakan oleh Pusbintal TNI.

Kata kunci : Pembinaan Mental Fungsi Komando, Radikalisme, Pencegahan, Prajurit Berkarakter, TNI AL

Abstract - Mental development is part of the development of Navy personnel with the function and task of fostering the attitudes and mentality of Navy personnel, an issue developing at this time according to the Indonesian Defense Minister General of the Army (Ret.) Ryamizard Ryacudu there are

¹ Strategi Pertahanan Laut, Fakultas Strategi Pertahanan, Universitas Pertahanan

² Strategi Pertahanan Laut, Fakultas Strategi Pertahanan, Universitas Pertahanan

³ Strategi Pertahanan Laut, Fakultas Strategi Pertahanan, Universitas Pertahanan

indications and concerns about the exposure of TNI soldiers by understanding radicalism, interrupted the Halal Bihalal event at the Gor Ahmad Yani Mabes TNI 3% of the TNI soldiers were exposed to radicalism. TNI success in carrying out the main tasks optimally both OMP and OMSP. Doctor Abdul Azis Al Quusy mentally said that it is a comprehensive guide between various functions with ability to deal with crises that afflict humans that can affect emotional and psychological. This study aims to analyze strategy of nodal and supporting inhibiting factors in fostering command function carried out in the Kolinlamil unit in Jakarta, and formulate the best model of the command function carried out in pendirat and KRI in supporting the prevention of radicalism. The method used in this research is descriptive qualitative describing the mental condition of soldiers to avoid the understanding of radicalism. From this research found that the inhibiting factors were the lack of interest from soldiers in mentoring activities in the command function, the lack of interest in soldiers participating in upgrading the command function mental training organized by TNI Pusbintal, the lack of Bintal manned personnel in units both in the pendirat and KRI element, As for the strategy that must be done are re-socialize the importance of mental development of command functions in the unit with the role of unit commanders, kasatker in mental and spiritual development, ideology and tradition of struggle, involving unit commanders or kasatker in upgrading the command functions organized by Pusbintal TNI.

Keywords : Mental Development Command Function, Radicalism, Prevention, Tough character, Indonesian Navy

Pendahuluan

Persoalan Pembinaan personel TNI AL merupakan bagian dari Pembinaan TNI AL dengan subjek maupun objek Pembinaan adalah manusia. Pembinaan personel adalah salah satu fungsi organik yang merupakan bagian terpenting dari pembinaan TNI AL secara keseluruhan, Fungsi organik penyelenggaraannya menjadi tanggung jawab Komandan atau Pimpinan kesatuan TNI AL mulai dari tingkat kesatuan yang terendah sampai yang tertinggi. Pembudayaan nilai luhur Pancasila harus diupayakan dari pengalaman nilai luhur Pancasila di berbagai bidang kehidupan⁴.

Pembinaan mental Angkatan Laut merupakan bagian dari pembinaan personel TNI AL dengan fungsi dan tugas membina sikap mental personel TNI AL, sehingga seluruh perilaku setiap anggota TNI AL sesuai dengan nilai-nilai Sapta Marga dan Sumpah Prajurit Bagi anggota TNI AL, wujud dan peran pembinaan mental sudah mewarnai jati dirinya sejak perjuangan merebut, menegakkan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia yaitu sebagai pejuang Prajurit dan Prajurit pejuang. Salah satu upaya agar jati diri TNI AL tersebut tetap terpelihara maka, pembinaan mental harus dilakukan secara sistematis dan

⁴ Amiro Asmaroini. "Menjaga Eksistensi Pancasila Dan Penerapannya Bagi Masyarakat di Era Globalisasi", *JPK: Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan* vol. 1, 2017, hlm 50-64

berlanjut, sehingga pembinaan mental TNI AL dapat berdaya guna dan berhasil guna

Keberhasilan dalam melaksanakan tugas pokok secara optimal baik itu yang bersifat OMP (operasi Militer Perang) dan OMSP (Operasi Militer Selain Perang) dalam rangka menegakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta ikut andil dalam memelihara perdamaian dunia baik yang bersifat regional maupun internasional selain di dukung oleh SDM dan Profesionalisme Prajurit TNI AL yang tinggi tetapi juga didukung oleh Mental Prajurit yang tangguh.

Tugas dan fungsi yang diemban oleh Pembina Mental adalah membangun kondisi mental prajurit yang tangguh guna mempersiapkan kemampuan dan kekuatan Prajurit dalam melaksanakan tugasnya sebagai insan yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Nasionalis, Militan, dan memiliki kematangan psikologis. Rendahnya pemahaman dominan dipengaruhi oleh factor eksterna, sikap nasionalisme dan patriotisme masih rendah⁵.

⁵ Luki Susanto, 2015. Faktor-faktor penyebab rendahnya pemahaman nilai-nilai sumpah pemuda.

Dr. Abdul Aziz Al Quusy dalam bukunya *A Contribution of Islamic Education on Mental Health Science* (1970) yang dikutip oleh Hasan Langgulung mendefinisikan Mental adalah paduan secara menyeluruh antara berbagai fungsi-fungsi psikologis dengan kemampuan menghadapi krisis-krisis psikologis yang menimpa kepada manusia yang dapat berpengaruh terhadap emosi dan dari emosi ini akan dapat berpengaruh terhadap kondisi Mental, sedangkan James Draver mental yaitu “*revering to the mind*” maksudnya adalah sesuatu yang berhubungan dengan fikiran atau fikiran itu sendiri.⁶

Kondisi mental Prajurit sangat berpengaruh terhadap kinerja prajurit didalam melaksanakan tugasnya serta kapasitas mental dan kejiwaannya, terutama bagi mereka yang bertugas di Kapal Perang (KRI) sebagai unsur pendukung dari Pertahanan Laut yang harus diawaki. Maka peran Pembina mental (Pabintal) atau permbina rohani disatuan kapal perang sangatlah penting serta peran Komandan satuan dikapal perang selaku Fungsi Komando juga

⁶ Abdullah Hendropriyono, 2009. *Terorisme: Fundamental Kristen, Yahudi dan Islam*.

mempunyai peran yang sangat strategis bagi prajurit dibawahnya.

Kurangnya personil yang mempunyai kemampuan sebagai Pembina mental setingkat perwira pertama menjadi persoalan yang sangat serius serta minimnya minat para komandan satuan di dalam mengikuti penataran Bintel Fungsi Komando yang diselenggarakan oleh Pusbintel TNI menjadi persoalan yang tidak mudah, apalagi dihadapkan dengan persoalan yang sedang berkembang saat ini di mana menurut menteri Pertahanan Republik Indonesia Ryamizard Ryacudu mengatakan ada beberapa prajurit TNI yang terpapar oleh paham radikalisme yang berdampak terhadap kualitas mental prajurit didalam melaksanakan tugasnya menjadi perhatian yang sangat serius, menjadikan persoalan tersendiri di dalam pelaksanaan pembinaan mental di satuan KRI.

Komando Lintas Laut Militer (Kolinlamil) Jakarta adalah bagian dari organisasi TNI AL yang merupakan Komando Utama pembinaan Markas Besar TNI Angkatan Laut yang berfungsi untuk mendukung Tugas Pokok TNI angkatan Laut sesuai dengan UU no 34

tahun 2004 yaitu menjaga keamanan di wilayah laut nusantara dan penegakan hukum di laut, melaksanakan tugas diplomasi pertahanan laut yang sejalan dengan kebijakan luar negeri Pemerintah Republik Indonesia, membangun kekuatan Matra Laut tugas pokok tersebut di samping adanya alutsista unsur KRI dan dukungan logistik operasional juga diperlukan dukungan Prajurit yang profesional di dalam melaksanakan tugasnya, didukung dengan kemampuan fisik juga mengedepankan Mental prajurit yang kuat dan bekarakter.

Indonesia merupakan negara kepulauan hal tersebut menjadikannya fokus perhatian mengenai kemampuan Indonesia dalam menjaga kedaulatan negara⁷.

Secara umum pembinaan disebut sebagai sebuah perbaikan terhadap pola kehidupan yang direncanakan, setiap manusia memiliki tujuan hidup tertentu dan ia mempunyai keinginan untuk mewujudkan tujuan tersebut, (Poerwa darmita : 2012), termasuk keinginan Prajurit Tentara Nasional Angkatan Laut yang mempunyai keinginan untuk mewujudkan prajurit yang tangguh

⁷ Susanto Zuhdi. (2018). "Sejarah Perjuangan Bangsa sebagai Modalitas Memperkuat

Pertahanan Negara. Jurnal Pertahanan & Bela Negara Vol 4 No 1"

,bermoral, beriman dan bermental baja di dalam setiap pelaksanaan tugas guna mendukung tugas pokok TNI yaitu menegakan kedaulatan dilaut dan mempertahankan wilayah laut Nasional.

Menurut Mitha Thoha (1989) Pembinaan adalah suatu tindakan, pola, proses, hasil, atau pernyataan yang lebih baik, menunjukkan adanya kemajuan. Peningkatan pertumbuhan evolusi atau berbagai kemungkinan berkembang peningkatan atas sesuatu di dalam pembinaannya, ada dua unsur pembinaan yaitu, *pertama* pembinaan itu bisa berupa suatu tindakan, proses atau pernyataan tujuan, dan *kedua* adalah pembinaan bisa menunjukkan kepada perbaikan atas sesuatu.⁸

Secara konseptual pembinaan atau (*empowerment*) berasal dari kata *POWER* (kekuasaan atau keberdayaan) karenanya ide utama pembinaan bersentuhan dengan konsep mengenai kekuasaan, kekuasaan seringkali dikaitkan dan dihubungkan dengan kemampuan individu untuk membuat individu melakukan apa yang diinginkan, terlepas dari keinginan atau minat mereka.

Dalam pelaksanaan konsep pembinaan hendaknya didasarkan pada

hal bersifat efektif dan pragmatis dalam arti dapat memberikan pencerahan persoalan yang dihadapi dengan sebaik-baiknya, dan pragmatis dalam arti mendasarkan fakta-fakta yang ada sesuai dengan kenyataan sehingga bermanfaat karena dapat di terapkan di dalam praktek. Menurut Masdar Helmi pembinaan adalah segala hal usaha, inktiar, dan kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan dan pengorganisasian serta pengendalian segala sesuatu secara teratur dan terarah.

Ketidaktercapaian apa yang diharapkan akan sangat berpengaruh terhadap kondisi seseorang atau organisasi tersebut baik itu secara psikis maupun mental, sehingga sangat mudah di pengaruhi oleh paham-paham yang betentangan dengan Ideologi Negara sebagaimana yang disampaikan oleh Menteri Pertahanan RI Ryamizard Ryacudu bahwa 3% prajurit TNI terindikasi adanya pengaruh paham Radikal atau terpapar paham radikalisme, hal ini disampaikan Menteri Pertahanan RI saat acara Halal Bihalal di Mabes TNI Cilangkap bertempat di GOR Ahmad Yani pada hari Rabu juni 2019. Disamping itu Menhan memaparkan, sebanyak 23,4 persen siswa

⁸ Mitha Thoha, *Pembinaan Organisasi Proses Diagnosa dan Intervensi* (Rajawali. 1989)

setuju dengan Negara Islam / Khilafah (pelajar SMA), kemudian 18,1 persen pegawai swasta tidak setuju dengan ideology Pancasila, dan 19,1 persen pegawai BUMN tidak setuju dengan Pancasila.

Berdasarkan hal tersebut, maka peran pembinaan sangat diperlukan untuk membangun, membangkitkan baik itu mental psikis prajurit guna me-*refrest* kondisi psikis dan mental prajurit agar kembali dan diharapkan tidak mengalami depresi, dan ini akan sangat membantu terhadap tugas pokok prajurit agar apa yang direncanakan dalam mendukung pertahanan laut di KRI dapat terlaksana dan tercapai dengan baik.

Peran pembinaan menurut psikologi pembinaan dapat diartikan sebagai upaya memelihara dan membawa suatu keadaan yang seharusnya terjadi dan atau menjaga keadaan sebagaimana seharusnya. Dalam manajemen pendidikan pembinaan dilakukan dengan maksud agar kegiatan atau program yang sedang dilaksanakan selalu sesuai dengan rencana dan tidak menyimpang dari hal-hal yang telah direncanakan

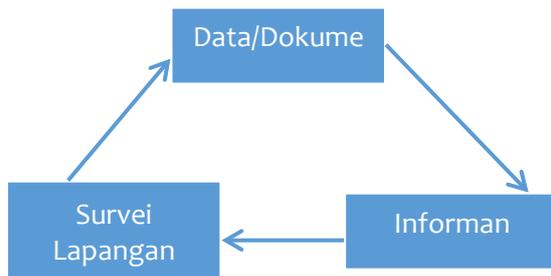
Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, dalam penelitian kualitatif berfungsi sebagai bekal untuk bisa memahami konteks sosial secara lebih luas dan mendalam.⁹ Metode penelitian dengan menggunakan tehnik wawancara, observasi dan dokumentasi serta sumber data yang langsung diperoleh dari informan yang didapat dari Komando Lintas Laut Militer Jakarta, Kementerian Agama RI, Pusat Pembinaan Mental TNI, Dinas Perawatan Personel Mabesal.

Penelitian dengan menggunakan jenis metode Kualitatif interaktif dengan cara mengumpulkan data langsung dari narasumber yang berkaitan dengan masalah pembinaan personel dan pembinaan mental, dengan metode Trigulasi dengan menggali kebenaran informasi, dengan gambar atau *potho*, catatan atau tulisan dengan tehknik wawancara observasi dan dokumentasi dalam pelaksanaannya dilakukan beberapa tahapan antara lain tahap perencanaan, tahap pelaksanaan atau tindakan, tahap

⁹ Lexy Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi, (Bandung: Remaja Rosdakarya. 2009)

analisa data serta tempat dan waktu penelitian.



Gambar 1. Desain Trigulasi Data sumber Michael Haberman
Sumber: Sugiyono, 2016¹⁰

Tahap perencanaan kegiatan yang di lakukan adalah penyusunan rancangan penelitian, tempat penelitian, sarana dan prasarana penelitian dan penyusunan instrumen penelitian. Tahap perencanaan penelitian dalam lima langkah yaitu, perumusan masalah, pengumpulan data, analisis data, pelaporan hasil dan perencanaan tindakan.

Tahap pelaksanaan peneliti sebagai pelaksana dan sebagai human instrumen yaitu melaksanakan pencarian informasi data, melakukan teknik wawancara dan dokumentasi, penelitian dalam tahap tindakan dengan prinsip *learning by doing* pada sekelompok orang untuk menemukan atau mengidentifikasi masalah dan mengupayakan solusi serta

mengulangi kembali bila hasil belum sesuai dengan yang diharapkan.

Taylor (1975) analisis data adalah merupakan proses yang merinci usaha secara formal untuk menemukan tema dan merumuskan hipotesis (ide) seperti yang disarankan dan sebagai usaha untuk memberikan bantuan dan tema pada hipotesis.

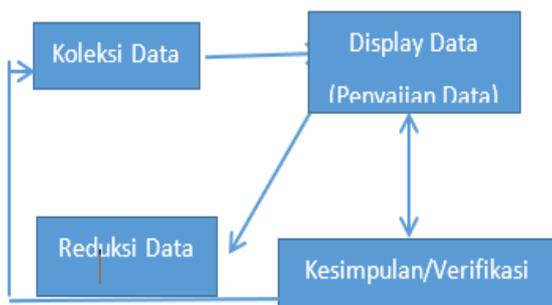
Lexy J. Moleong analisis data merupakan satu proses mengatur urutan data mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar. Analisis yang akan dilakukan secara deskriptif dengan memuat data data yang terkumpul, tahapan ini peneliti melakukan analisa data secara mendalam dengan melakukan wawancara kepada Kapusbintal TNI, Kadiswatpersal, Kasubdisbintal TNI AL, dan beberapa prajurit TNI AL di KRI di lingkungan Kolinlamil.dengan beberapa tahapan yaitu:¹¹

- a. Tahap pengumpulan data. Merupakan tahap awal dari aktivitas analisis
- b. Tahap Editing, proses proses pemeriksaan kejelasan terkait pengumpulan data.

¹⁰ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. (Bandung: Alfabeta. 2016)

¹¹ Lexy Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi, (Bandung: Remaja Rosdakarya. 2009)

- c. Proses Koding, proses identifikasi dan klasifikasi terhadap semua pernyataan yang ada pada instrumen pengumpulan data.
- d. Tahap pengujian, proses pengujian kualitas data
- e. Tahap pengujian hipotesis, yang nantinya akan dibuat kesimpulan dan keputusan.



Gambar 2. Analisis Data Kualitatif menurut Miles dan Huberman
 Sumber: Sugiyono, 2016¹²

Teknik pengumpulan data dengan menggunakan studi pustaka atau literatur, wawancara ke narasumber dan dokumentasi yang nantinya akan di jadikan bahan untuk menguji sejauh mana para prajurit memberikan pandangan terhadap pemahaman akan pentingnya Bintel Fungsi Komando.

Sumber data dari penelitian tesis ini terdiri dari data Primer dan Data Skunder, sumber data primer merupakan sumber

data yang langsung diberikan kepada pengumpul data, sedangkan data sekunder adalah merupakan sumber data yang tidak langsung diberikan kepada pengumpul data misalnya melalui orang lain atau dokumen.¹³

Data primer adalah data yang diperoleh dari informan instansi Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag RI), Kepala Pusat Pembinaan Mental TNI (Kapusbintal TNI), Asisten Personil Komando Lintas Laut Militer (Aspers Pang Kolinlamil), Kasubdis Bintel Diswatpersal Mabasal terkait implementasi Bintel Fungsi Komando dalam mendukung pencegahan paham radikalisme di lingkungan TNI AL, sedangkan data skunder merupakan data yang di peroleh dari informan terkait implementasi peran bintel fungsi komando yang disampaikan dalam berbagai literatur, naskah ilmiah, Buku, Jurnal dan laporan penelitian.

Hasil dan Pembahasan

Komando Lintas Laut Militer (Kolinlamil) sejak mulai dibentuknya di jakarta pada tanggal 1 Juli 1961 dengan nama Djawatan

¹² Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. (Bandung: Alfabeta, 2016)

¹³ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. (2016)

Angkatan¹⁴ Sampai menjadi Komando Lintas Laut Militer¹⁵ berdasarkan Tanggal 23 Juli 1971, nama Komando Lintas Laut Militer (KOLINLAMIL merupakan proses sejarah yang penuh dengan pengabdian, perjuangan dan pengorbanan bersama sama dengan tumbuh dan berkembangnya TNI AL.

Tugas yang harus di laksanakan oleh Komando Lintas Laut Militer meliputi pelaksanaan angkatan laut militer pada tugas Operasi Militer Untuk Perang (OMP) dan Operasi Militer Selain Untuk Perang (OMSP). Pelaksanaan angkutan laut militer pada tugas Operasi Militer Untuk Perang (OMP) meliputi bentuk organisasi pendaratan administrasi yang tergabung dalam tugas operasi gabungan dan operasi lintas laut militer dalam tugas operasi laut secara mandiri yang merupakan tugas operasi militer tunggal serta dalam tugas operasi angkutan laut militer dalam bentuk operasi bantuan angkutan. Sedangkan pelaksanaan angkutan laut militer pada tugas Operasi Militer Selain Untuk Perang (OMSP) meliputi dukungan angkutan laut seperti bantuan bencana alam, membantu tugas

kepolisian, membantu tugas pemerintah di daerah dan sebagainya.

Komando Lintas Laut Militer disingkat Kolinlamil adalah Komando Utama Pembinaan TNI AL yang bertindak sebagai Pembina tunggal sistem angkutan laut TNI dalam bidang pembinaan dan kesiapan tempur komando satuannya berkedudukan langsung dibawah Kasal dan komando utama operasional TNI yang dalam bidang penyelenggaraan operasi angkutan laut militer berkedudukan dibawah Panglima TNI. Kolonlamil beserta jajarannya yaitu Satuan Lintas Laut Militer disingkat Satlinlamil yang berkedudukan di Jakarta dan Surabaya yang merupakan komando pelaksana pembinaan yang disingkat dengan (Kolakobin) secara professional mengemban tugas dan tanggung jawab angkutan laut militer dalam rangka Operasi Militer Untuk Perang (OMP) dan Operasi Militer Selain Perang (OMSP) dengan pengertian bahwa secara leluasa laut dapat di manfaatkan sebesar besarnya bagi kepentingan nasional baik dalam aspek ke sejahteraan maupun pertahanan keamanan dan mencegah

¹⁴ Skep Menhankam Pangab tentang pokok-pokok Organisasi dan Prosedur ALRI Nomor: Kep/A/39/VI tahun 1971.tanggal 23 Juli 1971, Laut Militer (DALMIL).

¹⁵ Instruksi Kasal No.28/71 TW. 230204 Z/APR/1971 dan instruksi Komandan Kolinlamil Nomor: 02/INTR/KOLINLAMIL/V/1971, tanggal 4 Mei 1971.

pemanfaatan laut untuk kepentingan lawan atau calon lawan.¹⁶

Sesuai Stratifikasi doktrin yang meliputi doktrin pertahanan Negara “Sistem Pertahanan Rakyat Semesta” Doktrin TNI “Tri Dharma Eka Karma” dan doktrin TNI AL “Eka Sasana Jaya”. Kolinlamil melaksanakan peran, tugas dan fungsinya dalam wahana pengabdian sebaik- baiknya dengan penuh tanggung jawab, memegang teguh kebenaran, memiliki kejujuran dan mencapai keberhasilan.

Perjalanan sejarah berdirinya Kolinlamil diawali dari ide pemikiran strategis para sesepuh TNI AL yang mampu memandang jauh kedepan pentingnya sistem angkutan laut militer dalam menunjang tugas pokok TNI dan TNI AL. Kolinlamil dibentuk ditengah-tengah gencarnya Pemerintah Republik Indonesia merebut kembali Irian Barat dari penjajahan Belanda yang kemudian dengan pertimbangan kepentingan – kepentingan angkut logistik Angkatan Laut maupun TNI dan POLRI.

Sebagai bagian dari Komando Utama TNI AL, saat ini kolinlamil dipercaya untuk membawahi atau

membina unsur berjumlah 14 KRI yang terdiri dari:

a. Unsur KRI dalam jajaran Satlinlamil Jakarta

1. KRI Teluk Amboina – 503/JPG/1960
2. KRI Teluk Manado – 537/Jerman/1976
3. KRI Teluk Hading – 538/Jerman/1976
4. KRI Banda Aceh – 593/PT PALINA/2010
5. KRI Mentawai – 959/Honggaria/1964
6. KRI Karimata – 960/Honggaria/1964
7. KRI Tanjung Kambani – 971/JPG/1982
8. KRI Tanjung Nusa Nive – 973/Jerman/1982

b. Unsur KRI dalam jajaran Satlinlamil Surabaya

1. KRI Teluk Ratai – 509/USA/1944
2. KRI Teluk Bone – 511/USA/1976
3. KRI Teluk Lampung – 540/Jerman/1976

¹⁶ Surat Panglima TNI No. B/583-08/13/12/SRU tanggal 19 maret 2003 dan Telegram Kasal No:014/SPREN/03.03 TWU.0325 1420.

4. KRI Teluk Parigi – 539/Jerman/1976
5. KRI Banjarmasin 592/PT PALINA/2009
6. KRI Teluk Bintuni – 520



Gambar 3. Letak Geografis dan Wilayah Kerja Kolinlamil
 Sumber: Staf Personel Kolinlamil, 2019

Kolinlamil dalam menjalankan tugasnya sebagai Kotama Ops, Kolinlamil melakukan operasi angkutan laut TNI, baik dalam operasi militer perang (OMP) maupun operasi Militer Selain Peran (OMSP), serta bantuan operasi lainnya sesuai dengan kebijakan Panglima TNI. Sedangkan sebagai Kotama Bin (pembinaan), Kolinlamil merupakan pembina tunggal Angkutan Laut TNI, yaitu membina kemampuan sistem angkutan laut militer dan membina

potensi angkutan laut nasional guna kepentingan pertahanan dan keamanan negara di laut dan membina kesiapan operasional.

Lokasi Mako Kolinlamil dan Satlinlamil Jakarta berada di Jalan Raya Pelabuhan Pos IX Jakarta Utara sedangkan Satlinlamil Surabaya berada di Jalan Hang Tuah Ujung Surabaya. Wilayah kegiatan operasi yang dilaksanakan oleh Kolinlamil mencakup seluruh perairan yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke.

Komando Lintas Laut Militer di singkat Kolinlamil adalah Kotama Operasi yang bertugas menyelenggarakan operasi angkutan laut TNI baik dalam bentuk Operasi Militer Untuk Perang (OMP) maupun Operasi Militer Selain Perang (OMSP)¹⁷ dan bantuan angkut laut sesuai dengan kebijakan Panglima TNI.¹⁸

Komando Lintas Laut Militer di samping sebagai Kotama Operasi juga sebagai Kotama Bin (pembinaan) berfungsi sebagai pembina tunggal angkutan laut TNI¹⁹, membina kemampuan sistem angkutan laut militer, membina potensi angkutan laut nasional guna kepentingan pertahanan dan

¹⁷ Pasal 53 dari Peraturan Presiden RI Nomor 10 Tahun 2010

¹⁸ Peraturan Presiden No 10 Tahun 2010 Pasal 53

¹⁹ Peraturan Presiden RI Nomor 10 tahun 2010 Pasal 132

kemanan negara di laut, dan membina kesiapan operasional untuk melaksanakan angkutan laut TNI yang meliputi personel, alat-peralatan dan pembekalan baik yang bersifat taktis, strategis maupun administrative sesuai dengan kebijakan Panglima TNI yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kasal.²⁰

Beberapa tugas Kotama (Komando Utama) di jajaran TNI AL khususnya tugas pokok Kolinlamil:²¹

- a. Kolinlamil sebagai Kotama Operasi bertugas menyelenggarakan operasi angkutan laut TNI baik dalam rangka operasi militer untuk perang (OMP) maupun operasi militer selain perang (OMSP) dan bantuan angkutan laut sesuai dengan kebijakan Panglima TNI.
- b. Kolinlamil sebagai Kotama Pembinaan bertugas sebagai Pembina tunggal angkutan laut TNI, membina sistem angkutan laut militer, membina potensi angkutan laut nasional guna kepentingan pertahanan dan

kemanan negara di laut dan membina kesiapan operasional untuk melaksanakan angkutan laut TNI yang meliputi personel, alat-peralatan dan pembekalan baik yang bersifat taktis, strategis maupun administrative sesuai dengan kebijakan Panglima TNI.

Sehubungan dengan tugas pokok Kolinlamil, bahwa penyelenggaraan Operasi Militer Untuk Perang dirumuskan dalam bentuk Strategi Pertahanan Nusantara yang disingkat SPN yaitu pertahanan yang bersifat semesta yang memadukan kekuatan Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara dan seluruh sumber daya nasional yang merupakan suatu rangkaian yang tidak terputus dari awal datangnya musuh sampai dengan mengusirnya dari wilayah NKRI dalam rangka menegakkan kedaulatan Negara dan mempertahankan ke utuhan wilayah NKRI serta melindungi keselamatan segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia.

Tugas Kolinlamil dalam Operasi Militer Untuk Perang, Kolinlamil terlibat sebagai kekuatan pendukung yang

²⁰ Peraturan Presiden No 10 Tahun 2010 Pasal 132

²¹ Telegram Kasal Nomor 060/SREN/0510 TWU 0508.1816 tentang beberapa tugas Kotama (Komando Utama) di jajaran TNI AL

melaksanakan operasi pendaratan administrasi yang tergabung dalam tugas gabungan pendaratan administrasi yang mendukung operasi darat gabungan oleh tugas gabungan darat, adapun penyelenggaraan Operasi Militer Selain Perang di laksanakan bukan dalam rangka perang dengan negara lain tetapi untuk tugas-tugas lain seperti melawan pemberontakan bersenjata, gerakan separatis, tugas mengatasi kejahatan lintas Negara, tugas bantuan kemanusiaan dan tugas perdamaian. Operasi Militer Selain perang yang dilaksanakan oleh Kolinlamil²² adalah bersifat:

- a. Operasi tempur. Operasi angkutan laut militer yang di laksanakan oleh Kolinlamil secara mandiri ataupun terpadu dengan lembaga lainnya di tujukan untuk mendukung Satuan TNI mengatasi kekerasan bersenjata, seperti aksi terorisme, konflik komunal dan kekerasan bersenjata lainnya dengan prinsip menghentikan kekerasan bersenjata untuk menghindari korban yang lebih

besar, baik didalam negeri maupun dalam rangka misi perdamaian dunia dibawah bendera PBB.

- b. Operasi non tempur. Operasi angkutan laut militer di laksanakan oleh Kolinlamil di tujukan untuk membantu pemerintah dalam upaya memberdayakan wilayah pertahanan, membantu tugas pemerintah di daerah, membantu Kepolisian Negara, menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian dan pemberian bantuan kemanusiaan, pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan SAR atau *Search And Rescue*. Tugas yang sudah di laksanakan oleh Komando Lintas Laut Militer Jakarta Periode Tahun 2001 s.d. sekarang.

Periode tahun 2001 Komando Lintas Laut Militer ikut melaksanakan operasi pemulangan TKI Ilegal atau bermasalah dari Malaysia sebanyak 2.500 jiwa dan melaksanakan operasi lainnya baik pergeseran pasukan maupun logistik dan

²² Telegram Kasal Nomor 060/SREN/0510 TWU 0508.1816 tentang beberapa tugas Kotama (Komando Utama) di jajaran TNI AL

material. Tahun 2002 Kolinlamil melaksanakan *Joysailing* peserta KSA dan Lemhanas, terlibat dalam Pembukaan Bina Taqwa Pelajar Indonesia 2002 dengan Inspektur upacara Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Bapak H. M. Yusuf Kalla dan Pelepasan latihan Taruna AAL “Kartika Jala Krida 2002” keliling Indonesia, Malaysia, Singapura serta pelayaran Kebangsaan yang dibuka oleh Menteri Pendidikan Nasional Bapak Malik Fajar. Untuk kegiatan latihan Kolinlamil terlibat dalam latihan Pengendalian Laut 2002 yang dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia, Panglima TNI, Kepala Staf Angkatan dan Kapolri.

Selama kurun waktu tahun 2004 melaksanakan kegiatan Operasi dalam rangka OMSP antara lain Operasi kemanusiaan di Aceh dan Sumatera Utara mengangkut berbagai macam bantuan dari masyarakat maupun instansi pemerintah bagi korban bencana Tsunami. Pelibatan unsur TNI Angkatan Laut diawali dengan di berangkatkannya kapal Koarmabar yakni KRI Teluk Sabang dari dermaga Kolinlamil menuju Meulaboh pada tanggal 29 Desember 2004 dengan membawa bantuan kemanusiaan dan 98 Relawan beserta petugas PMI. Selanjutnya pada Januari

tahun 2005 tiga kapal Kolinlamil yaitu KRI Tanjung Kambani, KRI Teluk Parigi dan KRI Teluk Amboina berangkat dari dermaga Kolinlamil menuju Meulaboh, sementara KRI Tomini bergerak dari Belawan menuju Pelabuhan Kreung Geukeuh membawa bantuan kemanusiaan dan KRI Teluk Langsa melaksanakan pergeseran bahan kontak dari Satkorlak Sabang ke Meulaboh.

Operasi lainnya dalam kurun waktu tahun 2004 adalah Serpas Polri ke Aceh, Sermat (pergeseran material) ke wilayah Indonesia bagian timur, Serpas (pergeseran pasukan) Yon Raider Aceh, Serpas Satgas Banmin Aceh, Manlap AJ XXIV, Serpas Pam Rah Wan Aceh, Serpas Pam Rah Wan Maluku, Serpas Rencong Sakti Marinir Aceh, Serpas Pam Rah Wan Papua, Serpas Pamantas NTT, Sermat/log Babek TNI, Serlog (pergeseran logistic) Randis Dam V/Brw, Serpas Polri Poso, Angla Wisuda Purna Wira, Latsitarda Nusantara XXV, Serpas Babinsa Aceh, Serpas Polri Maluku, Sermat Log Expo Maluku, Angla Handak, Bintel Juang Remaja Bahari (BJRB), Sermat Banpers, Duklat Layar Remaja Bahari, Joy sailing, Sermat Pemda Maluku, Angla TKI.

Penyebutan jabatan Komandan Kolinlamil diubah menjadi Panglima Kolinlamil. Dibawah pimpinan Panglima

Kolinlamil, selama tahun 2005 Kolinlamil melaksanakan tugas-tugas operasi meliputi operasi pergeseran pasukan ke Propinsi Nangroe Aceh Darussalam, pergeseran pasukan ke Propinsi Maluku, pergeseran pasukan ke Propinsi Nusa Tenggara Timur, pergeseran pasukan ke Propinsi Papua, operasi Tanggap Darurat Bencana Aceh dan Nias, pergeseran pasukan dari Nangroe Aceh Darussalam dalam rangka penarikan pasukan pasca MOU Helsinki yang di bagi dalam 4 tahap²³.

Sedangkan operasi Bakti yang dilaksanakan antara lain mendukung kegiatan Olah Raga Ekowisata, mendukung personel dan material dalam kegiatan Dragon Boat Open Tournament, mendukung angkutan laut untuk mengangkut Perahu Layar, mendukung pengangkutan bantuan sosial Pemerintah Daerah Jawa Timur, mendukung pengangkutan bantuan sosial ke Nangroe Aceh Darussalam dan Nias, pergeseran material Pemerintah Daerah Maluku, mendukung angkutan laut bahan bangunan, mendukung angkutan laut pemulangan TKI, mendukung angkutan laut Lebaran dan mendukung angkutan laut bagi Komisi I DPR-RI.

Hubungan kegiatan pelaksanaan tugas pokok Kolinlamil senantiasa melakukan koordinasi dan hubungan kerjasama dengan komando samping, instansi Pemerintah maupun swasta dan masyarakat sesuai dengan azas kepentingan tugas yang emban, sehingga Kolinlamil dari tahun ke tahun terus berupaya melaksanakan tugas secara optimal sesuai fungsi Kolinlamil yang meliputi fungsi pembinaan dan fungsi opsional yang dihadapkan pada segala bentuk tantangan yang dihadapi. Pada tahun berikutnya tahun 2006 Kolinlamil mendukung pergeseran pasukan dalam rangka mengatasi gerakan separatis di Papua, mendukung angkutan laut militer dalam rangka pengamanan wilayah perbatasan di Nangroe Aceh Darussalam, Papua, Nusa Tenggara Timur dan Pulau-pulau terluar, mendukung angkutan laut militer dalam rangka membantu tugas pemerintah daerah seperti angkutan laut Lebaran, *Joysailing*, kegiatan Bina Taqwa Pelajar Indonesia dan membantu Polri dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat di Maluku, Nusa Tenggara Timur dan Papua serta membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian dan

²³ Keputusan Kasal Nomor Kep/45.a/VI/1997 tanggal 22 Juli 2005 tentang Pokok-pokok

Organisasi dan Prosedur Kolinlamil beserta perubahannya

pemberian bantuan kemanusiaan dengan jumlah muatan personel yang diangkut sejumlah 33.024 orang dan material 2.931 ton.

Tahun 2011 selain Kolinlamil melaksanakan operasi rutin sebagaimana yang dilaksanakan pada tahun sebelumnya, Kolinlamil turut berperan dalam operasi pembebasan sandera pada peristiwa pembajakan Kapal MV. Sinar Kudus milik PT. Samudera Indonesia oleh Perompak Somalia yang terjadi pada tanggal 16 Maret 2011 dengan melibatkan KRI Banjarmasin.

Pembajakan ini merupakan wujud nyata ancaman non militer berupa ancaman bersenjata yang berasal dari luar negeri yang bersumber dari kejahatan terorganisasi lintas Negara yang terjadi diluar perairan yurisdiksi nasional Indonesia. Kapal berbobot mati 8911 ton memuat biji nikel dan diawaki oleh 31 orang ABK yang 20 orang diantaranya adalah warga negara Indonesia berlayar dari Pomala (Sulawesi Selatan) menuju Rotterdam (Belanda) dibajak di Perairan Laut Arab tepatnya pada posisi 350 NM sebelah Tenggara Oman dan merupakan kapal pertama berbendera Indonesia yang dibajak oleh Perompak Somalia.

Meskipun setelah 46 hari kapal beserta ABK nya telah berhasil di

bebaskan melalui operasi militer dan tebusan yang nilainya besar, namun peristiwa ini harus dijadikan pelajaran bagi bangsa kita dalam menghadapi setiap ancaman, sehingga ancaman serupa tidak terulang kembali. Oleh sebab itu sangatlah diperlukan untuk mencari solusi pemecahannya dalam penanganan keamanan laut yang merupakan kebutuhan yang realistis dalam penanggulangan ancaman dalam rangka melindungi kepentingan nasional. Akhirnya pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2011 Satuan Tugas Merah Putih diterima secara resmi oleh Presiden RI Bapak Susilo Bambang Yudhoyono dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Dalam melaksanakan tugas pokok Komando Lintas Laut Militer (Kolinlamil) menyelenggarakan Fungsi:

- a. Bidang Pembinaan, diantaranya:
 1. Pembinaan kekuatan sesuai dengan program pembinaan kekuatan TNI AL meliputi Kapal, terminal serta sarana dan prasarana pendukung dalam jajaran kolinlamil melalui pemeliharaan, perawatan, penelitian, pengujian dan pengembangan.

2. Pembinaan kemampuan penyelenggaraan angkutan laut militer melalui latihan, penelitian, pengujian serta pengembangan taktik dan prosedur angkutan laut militer sesuai rencana dan program TNI AL.
3. Membantu angkutan laut nasional dalam rangka bhakti TNI sesuai dengan kebijakan Panglima TNI.
4. Melaksanakan dukungan logistik operasi melalui operasi angkatan laut militer sesuai dengan operasi TNI.

- 1) Pembinaan kesiapan operasional kapal dan terminal dalam rangka pelaksanaan angkutan laut TNI termasuk dukungan terhadap operasi pertahanan dan keamanan Negara.
- 2) Pembinaan Administrasi.

b. Bidang Operasi. Diantaranya:

1. Mengkoordinasikan dan menyusun rencana dan program angkutan laut untuk seluruh jajaran TNI berdasarkan rencana dan program TNI.
2. Melaksanakan angkuta laut TNI yang meliputi personel, alat-peralatan dan pembekalan baik yang bersifat administrative maupun taktis dan strategis.

Dictionary of American History lebih populer digunakan untuk suatu individu, partai atau gerakan yang berkeinginan untuk merubah keberadaan suatu peraktek, institusi atau system sosial secara tepat dalam politik Radikal sering digunakan dalam sebuah partai yang merefleksikan pandangan kelompok kiri (Norman Markowitz 2003).

Radikalisme dalam sumber yang lain dikatakan bahwa radikalisme adalah penggabungan dari dua kata “Radikal” dan “Isme”, radikal berasal dri kata Radik/akar adalah suatu yang ekstrim, fundamental atau mendasar dan radikalisme adalah sautu paham yang menghendaki suatu perubahan secara drastis dan ekstrim, perubahan radikal tidak selalu berarti negative akan tetapi radikalisme lebih cenderung kepada konotasi negative, karena dalam perlakuannya selalu dengan cara-cara ekstrim, kekerasan.

Radikalisme dalam pendapat lain seperti yang dikatakan oleh Menteri Agama RI radikalisme adalah kelompok yang berusaha untuk merubah, menggantikan ideologi dari sebuah negara yang sah dengan ideologinya mereka, berusaha untuk menggantikan ideologi Pancasila dengan ideologinya mereka dan mengganti sistem pemerintahan dengan sistem pemerintahannya mereka.²⁴

Peneliti berusaha mencari data tentang adanya indikasi terpaparnya prajurit TNI sebagaimana yang disampaikan oleh Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu bahwa ada indikasi 3% prajurit TNI terpapar paham radikalisme, akan tetapi secara real angka data tersebut tidak ada, dengan demikian peneliti berpendapat bahwa apa yang disampaikan dari pernyataan Menhan RI tersebut hanya sebagai *warning* akan pentingnya pencegahan paham radikalisme di jajaran TNI. kalo dilihat dari presentasi 3% dari seluruh prajurit TNI yang ada, maka ini adalah termasuk angka yang cukup besar dan perlu penanganan secara serius, maka peneliti memempatkan judul penelitian dengan dasar apa yang disampaikan oleh menteri

Pertahanan RI, yaitu optimalisasi Bintel Fungsi Komando dalam mendukung pencegahan paham radikalisme di lingkungan TNI AL.

Ciri-ciri gerakan paham radikalisme sebagaimana di sampaikan oleh Yusuf Qordhowi (Islam Radikal, penerbit Era Intermedia) mengungkapkan bahwa kelompok radikal agama dapat di cirikan oleh beberapa karakter, antara lain:

a. Mengklaim Kebenaran Tunggal

Mereka dengan mudahnya menyesatkan kelompok lain yang tak sependapat dengannya, mereka memposisikan diri seolah-olah paling bertanggung jawab untuk meluruskan kembali manusia yang tak sefaham dengannya

b. Mengutamakan Ibadah Secara Penampilan dan Jihadis

Beberapa aspek ibadah yang diutamakan adalah dalam hal penampilan, seperti Gaya pakaian, selain itu mereka juga mengutamakan aktualisasi Negara Islam dengan siap berjihad untuk hal tersebut.

c. Menggunakan Cara - Cara Kekerasan

Melakukan tindakan jihadis seperti dengan melakukan pengeboman,

²⁴ Wawancara dengan Menteri Agama RI bapak Fahrurrozy, Jakarta oktober 2019

penculikan, penyanderaan dan sebagainya yang dapat menarik perhatian masa atau public

d. Mudah Mengkafirkan Orang Lain.

Mereka mudah berburuk sangka kepada orang lain yang tak sepaham dengan pemikiran serta tindakannya, mereka cenderung memandang dunia ini hanya dengan dua warna yaitu hitam dan putih.

e. Tertutup dengan Masyarakat

Mereka lebih banyak bergaul, berkumpul dan berkomunikasi hanya dengan komunitasnya dan cenderung tertutup dengan tetangga sekitar.

f. Apolitik

Tidak mengikuti kebijakan pemerintah yang tidak menerapkan sistem Khilafah.

Prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut Komando Lintas Laut Militer Jakarta, Prajurit Tentara Nasional Indonesia adalah warga negara yang di pilih dan di didik serta di bentuk dalam masa pemebntukan keprajuritan untuk patuh dan tunduk pada semua aturan-aturan yang sudah di tetapkan sebagai bentuk kepatuhan terhadap segala

perintah atau pun putusan sesuai dengan sumpah prajurit. Dalam kamus lengkap Inggris-Indonesia, Indonesia-Inggris (Hoetomo 2005) menggunakan kata Army untuk Tentara dan Soldier untuk Prajurit, sedangkan menurut Windy Novita (tanpa tahun) dalam kamus lengkap bahasa Indonesia mengartikan Prajurit adalah tentara.²⁵

Prajurit adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang sitentukan dalam peraturan perundang-undangan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri dalam dinas keprajuritan²⁶. Undang-undang tersebut di jelaskan bahwa untuk menjadi seorang prajurit TNI, baik Peajurit Sukarela maupun Prajurit wajib harus dapat memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.²⁷

Selektifitas yang cukup ketat didalam pelaksanaan penerimaan calon prajurit akan sangat berpengaruh terhadap hasil atau *out come* bagi prajurit itu sendiri, baik dalam hal nasionalisme, religius dan taat terhadap Sapta Marga, Sumpah Prajurit ,8 wajib TNI serta Tri Sila

²⁵ Hoetomo, Kamus lengkap Inggris – Indonesia, Indonesia – Inggris (2005)

²⁶ Undang-Undang RI Nomor 34 tahun 2004 pasal 21

²⁷ Undang-Undang RI Nomor 34 tahun 2004 pasal 21

Angkatan Laut dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok.

Prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut di dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya berpedoman kepada Peraturan Dinas dalam Khas TNI Angkatan Laut tanggal 9 november 2006 yang berisi aturan organisasi mulai dari bentuk organisasi, pelaksanaannya, aturan dan tehnik pelaksanaannya sampai kepada jadwal kegiatan yang harus dilaksanakan yang bersifat rutin.²⁸

Peraturan Dinas Dalam (PDD) khas TNI AL dilaksanakan dengan prinsip yang berdasarkan kepada Tri Sila TNI AL yaitu, Disiplin, Hirarki dan Kehormatan Militer, dalam petunjuk induk tradisi TNI AL yang di keluarkan oleh Subdisbintal Diswatpersal juli 2009.

Penanaman dan pemahaman doktrin Tri Sila TNI AL harus seyogyanya di tanamkan dan terus di sosialisasikan terutama bagi para prajurit remaja sehingga dalam setiap pelaksanaan tugas tercermin kepatuhan dan ketaatan terhadap atasan dalam setiap pelaksanaan tugas guna mendukung tugas pokok.

Dinamika perkembangan yang saya amati adanya degradasi dalam

implementasi dari doktrin tri sila angkatan laut di satuan, ini berdampak terhadap sikap dan etika prajurit terhadap atasannya yang mempunyai fungsi komando, sehingga berpengaruh terhadap mental dan moral prajurit, perlu adanya penekanan kembali tentang hakikat dari tri sila TNI AL bagi seluruh prajurit agar tetap terjaga dari ciri khas TNI AL.

Peran atasan selaku fungsi komando sangatlah berpengaruh terhadap para bawahannya dalam setiap pelaksanaan tugas sehingga dapat dijadikan tauladan atau contoh bagi para anggotanya. Dalam bentuk buku yang berjudul “Peraturan Disiplin Prajurit Tentara Indonesia” disebutkan bahwa Atasan adalah setiap prajurit tentara nasional Indonesia yang karena pangkat dan jabatannya berkedudukan lebih tinggi dari pada pangkat dan jabatan prajurit tentara nasional Indonesia yang lain²⁹.

Para kasatker atau komandan satuan atau komandan KRI mempunyai peran yang sangat penting terhadap parajurit bawahannya, dimana suatu saat dia harus bisa menjadi sebagai komandan, atasan, abang, atau bapak bagi

²⁸ Keputusan Kasal Nomor: Skep/1636/XI/2006, tanggal 9 november 2006.

²⁹ Keputusan Panglima TNI Nomor: Kep/22/MII/2005, tanggal 10 agustus 2005

bawahannya sehingga harus mampu memahami apa yang terjadi pada bawahannya baik yang bersifat mental, spiritual, masalah keluarga masalah ekonomi dan lain lain, sehingga sedapat mungkin bagi para komandan untuk dapat menjadi solusi bagi bawahannya dan menjadi suri tauladan bagi prajurit di bawahnya. (Hasil Wawancara dengan Aspers Pangkolinlamil, Kolonel laut pelaut Bagus Handoko. S.H. M.Si)

Kemudian dalam sistem pembinaan personel di jajaran TNI Angkatan Laut sebagaimana terdapat dalam buku Implementasi Bintel Fungsi Komando bahwa pembinaan personel (Binpers) TNI Angkatan Laut bukan hanya menjadi tanggung jawab pengemban fungsi pembinaan personel tetapi juga merupakan tanggung jawab semua aparat pengemban fungsi pengguna personel.

Lebih lanjut dalam buku tersebut di jelaskan tentang fungsi penggunaan personel itu adalah:³⁰

1. Atasan langsung yaitu komandan dan kasatker (kepala satuan kerja) yang berfungsi sebagai subyek dalam pembinaan personel

dengan tugas dan kewajiban untuk melaksanakan koordinasi dan mengandalikan personel di bawahnya.

2. Semua personel TNI Angkatan Laut melalui paradigma siklus” Atasan dan Bawahan” yaitu bahwa setiap personel adalah atasan bagi personel yang berada di bawahnya demikian juga sebaliknya atasan sebenarnya adalah bawahan bagi prajurit yang berada di atasnya, setiap personel bertanggung jawab untuk membina bawahannya agar mendapatkan personel yang berhasil guna dan berdaya guna.

Peneliti mempunyai pandangan tentang fungsi Pembinaan sebagai fungsi komando yang menjadi tugas serta fungsi para atasan atau komandan dalam membina prajurit di bawahnya yang di lakukan di kotama komando lintas laut militer Jakarta yaitu dengan dua Cara yaitu:

³⁰ Keputusan Panglima TNI Nomor: Kep/22/VIII/2005, tanggal 10 agustus 2005

- a. Secara Organik adalah tugas dan tanggung jawab yang diberikan secara fungsi komando yang dibantu oleh para staf sesuai fungsi satuan yang dalam pelaksanaannya merupakan tugas dan tanggung jawab komandan atau kasatker sesuai ketentuan organisasi dan prosedur yang ada, yang berkaitan dengan program kerja dan anggaran.
- b. Secara personal adalah tugas dan tanggung jawab dari setiap atasan terhadap bawahannya yang berada dibawah kendalinya, sangat ditentukan oleh sosok pribadinya dari seorang atasan/komandan terhadap bawahannya atau anggotanya, akan di jadikan contoh dan tauladan bagi anggota dibawahnya serta menjadi pigur yang baik dan mental yang baik sehingga menjadikan bawahannya/anggotanya menjadi baik.

Secara rantai komando dalam organisasi Tentara Nasional Indonesia

Angkatan Laut dimana unsur pimpinan yang paling tinggi yaitu Kepala Staf Angkatan laut dalam pelaksanaan fungsi Komando mempunyai tugas tentang Tentara Nasional Indonesia³¹ dimana tercantum tugas dan kewajiban kepala staf angkatan laut yaitu:

- a. Memimpin Angkatan Laut dalam membina kekuatan dan kesiapan Operasional Angkatan.
- b. Membantu Panglima TNI dalam penggunaan komponen komponen pertahanan Negara sesuai dengan kebutuhan Angkatan.
- c. Melaksanakan tugas lain sesuai matra masing masing yang diberikan oleh Panglima TNI.

Sesuai dengan tuntutan tugas yang diberikan kepada TNI Angkatan Laut, maka Kepala Staf angkatan Laut membuat aturan aturan sebagai pedoman dan harus di pedomani oleh seluruh prajurit di bawah Komandonya, aturan tersebut dicantumkan di dalam peraturan Dinas Dalam Khas TNI Angkatan Laut yang di sebut dengan PDD Khas TNI AL.

PDD Khas adalah pedoman setiap prajurit dalam melaksanakan tugas yang

³¹ Undang-undang RI Nomor 34 tahun 2004 Pasal 16

di tetapkan dan disahkan oleh Kepala Staf Angkatan Laut melalui Surat Keputusan Kasal dimana di dalamnya di cantumkan aturan-aturan bentuk kegiatan dan tehknis pelaksanaannya dan ada juga peraturan yang disebut dengan PKST dan PHST.

PKST adalah Perintah Komandan Sifat Tetap yang memuat segala peraturan ,petunjuk,prosedur dan tata cara kedinasan yang disusun dan di tetapkan oleh Komandan Kapal (Dan KRI) yang di sesuaikan dengan jenis dan tipe kapal, meliputi organisasi, kongsignes kapal, peraturan instruksi dan tugas-tugas ABK (Anak Buah Kapal) yang sedang berlayar,.,adapun PHST adalah Perintah Harian Sifat Tetap yang isinya hampir sama dengan PKST.namun berlaku untuk seluruh prajurit di setiap satuan Pendirat (Pendirian Darat atau satuan di darat) atau KRI yang sedang sandar yang disebut jaga darat termasuk di satuan Kolinlamil yang bertujuan untuk di ketahui,di mengerti, di taati dan di laksanakan oleh seluruh prajurit dan pelaksanaannya di pertanggung jawabkan oleh Komandan Satuan.yang bersifat PKST maupun PHST berisikan jadwal kegiatan yang harus di laksanakan oleh setiap prajurit, setiap harinya sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang

di pikulnya, kegiatan yang terdapat dalam PKST maupun PHST tersebut adalah kegiatan yang harus dilaksanakan secara rutin selama tidak ada perintah lain.

Tabel 1. Rekap Personel Kolinlamil

Kekuatan	DSP	Rill	Persentase (%)
Militer	2465	2011	81,58
PNS	201	138	68,66
Jumlah	2666	2149	80,61

Sumber: Disminpers Kolinlamil, 2019

Tabel 2. Rekapitulasi Data Personil Kolinlamil yang Bermasalah

Strata	Pidana	Disiplin	Proses	Sesai	Belum	Jumlah
Perwira	2	5	4	1	1	7
Bintara	2	8	-	-	-	10
Tamtama	9	9	-	-	-	18

Sumber: Data Dalpres Kolinlamil Jakarta, 2019

Data tersebut masih adanya personel kolinlamil Jakarta yang melakukan tindakan indisipliner yang berkenaan dengan masalah disiplin maka perlu di optimalkan peran dari Pembinaan Mental Fungsi Komando guna lebih meminimalisir adanya pelanggaran yang dilakukan oleh anggota, strata lebih tinggi jumlah anggota yang bermasalah adalah ditingkat Bintara dan Tamtama.

Realisasi Program Kegiatan Mental Komando Lintas Laur Militer Jakarta Pencapaian sasaran pembinaan mental

personel atau prajurit Kolinlamil kegiatan yang di laksanakan melalui tiga komponen pembinaan yaitu Pembinaan Mental Rohani (Bin Roh), Pembinaan Mental Tradisi Kejuangan (Bin Trajuang) dan Pembinaan Mental Idiologi (Bin Id)

Perbedaan komponen pembinaan mental yang di laksanakan di kotama dan di tingkat Mabes TNI yaitu terletak pada tidak adanya komponen Pembinaan Mental Psikologi, sebagaimana yang terdapat didalam peraturan Panglima TNI Nomor:Perpang/1/I/2008, tanggal 3 januari 2008 tentang petunjuk pelaksanaan pembinaan Mental TNI Pinaka Baladika bahwa pembinaan Mental TNI merupakan keterkaitan fungsional antara empat komponen yaitu Pembinaan Mental Rohani, Pembinaan Mental Idiologi, Pembinaan Mental Tradisi Kejuangan dan Pembinaan Mental Psikologi.

Peneliti menjelaskan hanya Tiga Komponen Pembinaan yang terdapat di TNI AL yaitu:

a. Pembinaan Mental Rohani,

Pembinaan Mental Rohani adalah segala usaha, pekerjaan dan kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, mempertinggi moral atau akhlak yang

luhur baik dalam hubungan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa, manusia dengan sesama maupun diri pribadi dengan lingkungannya.

b. Pembinaan Mental Ideologi.

Pembinaan Mental Ideologi adalah segala usaha, pekerjaan dan kegiatan pembinaan mental ideology Pancasila dalam kehidupan Prajurit TNI sebagai insan Pancasila yang berjiwa Sapta Marga dan memegang teguh Sumpah Prajurit.

c. Pembinaan Mental Tradisi Kejuangan.

Pembinaan Mental Tradisi Kejuangan adalah segala usaha, pekerjaan dan kegiatan pembinaan mental kejuangan berdasarkan nilai-nilai Agama, Pancasila, Sapta Marga, Sumpah Prajurit serta sosial budaya yang telah menjadi tradisi TNI.

Pelaksanaan program Bintel Fungsi Komando yang dilaksanakan di Kolinlamil Jakarta program kegiatan dapat dilihat dari dua sisi yaitu:

Pertama: secara Struktural, program kegiatan pembinaan mental secara struktural di satuan komando lintas laut militer Jakarta merupakan bagian dari Dinas Administrasi Personel (Disminpers) komando lintas laut militer yaitu Subdis Bintel, program kegiatan bintel disusun berdasarkan fungsi

organisasi dan prosedur komando lintas laut militer Jakarta dan harus di pertanggung jawabkan secara struktural oleh pejabat personel yaitu Kadisminpers komando lintas laut militer Jakarta kepada Aspers Pangkolinlamil Jakarta.

Kedua: secara Tekhnis, secara teknis program kegiatan Bintel di lingkungan TNI Angkatan Laut disusun oleh Subdisbintel Diswatpersal Mabesal dan dikirim ke semua satuan yang ada di jajaran TNI Angkatan Laut, termasuk Komando Lintas Laut Militer Jakarta untuk di jadikan dasar dalam membuat program kegiatan dan pelaksanaannya. Sebagaimana yang di kemukakan oleh Perwira Rohani Islam yang berdinasi di Kolinlamil Jakarta bagian Dinas Perawatan Personel kolinlamil Jakarta Mayor laut (KH) Latief Wibawa “pembinaan mental secara umum di Komando Lintas Laut Militer Jakarta, pada dasarnya berpedoman kepada aturan-aturan yang telah di tetapkan oleh Subdisbintel Diswatpersal Mabesal, dimana setiap tahunnya akan di keluarkan telegram sistem pembinaan Mental di jajaran TNI AL.(Wawancara dengan Mayor Laut (KH) Latief Wibawa, tanggal 30 oktober 2019)

Berdasarkan program kerja dan Anggaran Dinas Administrasi personel

komando lintas laut militer Jakarta tahun anggaran 2019 kegiatan pembinaan mental diantaranya adalah

- a. Menyusun rencana dan melaksanakan program pembinaan mental anggota Komando Lintas Laut Militer baik yang Militer maupun Sipil beserta keluarganya.
- b. Menyelenggarakan kegiatan mental yang meliputi pembinaan mental Rohani, mental tradisi kejuangan dan pembinaan mental Idiologi, santi aji dan santi karma bagi personel militer dan pegawai negeri sipil beserta keluarganya.
- c. Menyelenggarakan peringatan hari besar Agama (PHBA).
- d. Menyelenggarakan pembinaam atau penyuluhan atau bimbingan pernikahan, talak, cerai dan rujuk (NTPCR) serta pembinaan penyelesaian masalah rumah tangga bagi anggota yang bermasalah.
- e. Membantu dan mengarahkan pelaksanaan pembinaan mental di lingkungan kompleks-komplek TNI AL Jakarta.
- f. Membantu pelayanan pemakaman anggota yang

meninggal baik militer maupun PNS dan keluarganya di lingkungan komando lintas laut militer Jakarta.

Recana program kegiatan pembinaan mental tersebut bertujuan untuk memberikan gambaran secara garis besar tentang kegiatan pembinaan mental di satuan komando lintas laut militer Jakarta serta usaha-usaha yang akan ditempuh oleh satminpers dan subdisbintal dalam melaksanakan pembinaan personel ditahun 2019. dan sebagai masukan kepada pimpinan untuk menentukan kebijakan dibidang pembinaan personel di lingkungan Komando lintas laut militer Jakarta, dasarnya adalah Telegram Kasal Nomor 008/WAT/0119 tentang pelaksanaan giat bintal TA 2019.

Implementor dalam Implementasi Bintal Fungsi Komando dalam mendukung pencegahan paham radikalisme di lingkungan TNI AL kotama Komando Lintas Laut Militer Jakarta

Implementor dalam Implementasi Bintal fungsi Komando sangat berperan penting dalam pelaksanaan jalannya sebuah kebijakan, implementor kebijakan adalah mereka yang secara resmi bertanggung jawab baik secara

individu/lembaga atas pelaksanaan program dilapangan.

Berdasarkan observasi dan hasil penelitian di lapangan implementor dalam implementasi kebijakan Pembinaan Mental Fungsi Komando secara kedinasan yang bertugas dalam membuat kebijakan bintal fungsi komando adalah Pusat Pembinaan Mental TNI (Pusbintal TNI) untuk tingkat MabesTNI, dimana kebijakan yang dilakukan oleh Pusbintal TNI dalam mendukung kegiatan pembinaan Mental Fungsi Komando dengan menyelenggarakan Penataran Bintal fungsi Komando (Tar BFK) dengan implementor dari masing – masing Angkatan yang ditunjuk perwakilan personel guna mengikuti kegiatan penataran bintal fungsi komando,

Hasil penelitian di dalam pelaksanaan dan melaksanakan kebijakan program penataran bintal fungsi komando sangat minim atau kurang diminati terutama dilingkungan TNI AL dengan berbagai macam kendala, diantaranya ada yang mengartikan seandainya ikut menjadi peserta TAR BFK maka nantinya akan dijadikan PAROH (Perwira Rohani) padahal tidak demikian adanya. ada juga yang beranggapan dari sebagian personel yang mengatakan

bahwa kegiatan penataran Bintel Fungsi Komando tidak berpengaruh terhadap jenjang karier, terlihat dari tidak ada antusias dari masing masing angkatan untuk mengikuti serta mengirimkan perwakilan personel nya untuk mengikuti penataran tersebut, padahal penataran bintel fungsi komando sangat penting dalam pencegahan dan cegah dini agar tidak adanya anggota atau personel TNI yang terpapar paham radikalisme atau guna meminimalisir terjadinya pelanggaran di lingkungan prajurit TNI dan TNI AL.

Implementor dari kebijakan Implementasi tingkat Angkatan, peneliti juga melakukan wawancara dengan Subdis Bintel Diswatpersal Mabesal sebagai Implementor pembinaan mental tingkat angkatan/ Angkatan Laut Kolonel Laut (KH) Harun Arrasyid, serta melakukan wawancara dengan implementor tingkat Kotama TNI AL Dinas Administrasi Personel Kasubsi Bintel Komando Lintas Laut Militer Jakarta Letkol Laut (KH) Juliana, sehingga hasil yang didapat lebih maksimal dan terpercaya.

Kebijakan yang di keluarkan oleh Pusat Pembinaan Mental TNI dan dalam implementasinya sudah sangat baik, namun masih terkendala dengan animo

atau ke ikut sertaan dari personel terutama TNI AL yang sangat sedikit dalam mengikuti kegiatan Penataran Bintel Fungsi Komando. termasuk di kotama Komando Lintas Laut Militer Jakarta yang mengikuti Tar BFK hanya para rohaniawan saja, padahal idealnya yang harus ikut dalam Tar BFK adalah para Komandan KRI atau para Kasatker sebagai fungsi Komando dari pembinaan mental. Karena pembinaan mental prajurit bukan hanya pembinaan mental rohani saja, tetapi ada pembinaan mental Ideologi dan Pembinaan Mental Tradisi Kejuangan.

Rifley dan dalam Leo Agustino (2008) adalah pendekatan what happen atau sering disebut juga dengan pendekatan bottom up, menginginkan adanya pengungkapan kejadian-kejadian dalam ranah implementasi kebijakan yang terjadi dilapangan secara jujur dan terbuka, pendekatan what happen ini di harapkan dapat membuka tabir kekurangan format kebijakan yang sedang diimplementasikan, memberikan gambaran best practices dalam memodifikasi kebiakan untuk mencapai *output* dan *outcomes*, serta penyimpangan-penyimpangan kebijakan yang menjadikan kegagalan suatu program. maka peneliti mempunyai saran

dalam implementasi kebijakan Tar Bintel Fungsi Komando agar bisa dilaksanakan secara parsial oleh setiap Angkatan sebagai penyelenggara sekaligus pelaksanaannya.

Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Bintel Fungsi Komando dalam mendukung pencegahan paham Radikalisme dilingkungan TNI AL

Penelitian Implementasi Bintel Fungsi Komando dalam mendukung pencegahan paham radikalisme di lingkungan TNI AL peneliti menggunakan teori Van Meter dan Van Horn dalam mengidentifikasi factor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat implementasi.

a. Komunikasi

Antar Aktivist Pelaksana, komunikasi dan koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan public, semakin baiknya sebuah komunikasi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi dari kebijakan, asumsinya maka akan sangat kecil kemungkinan untuk terjadi kesalahan-kesalahan dan demikian pula sebaliknya.³²

Kejelasan dari tujuan dan isi sebuah kebijakan akan menjadi sangat penting

dalam mengimplementasikan suatu kebijakan, para agen pelaksana harus mengerti dengan jelas apa yang menjadi tujuan dilaksanakannya suatu kebijakan serta isi dari kebijakan tersebut. Peneliti mendapatkan berdasarkan hasil wawancara dengan pihak terkait, maka koordinasi dan komunikasi bukan merupakan factor penghambat implementasi bintel fungsi komando dalam mendukung pencegahan paham radikalisme dilingkungan TNI AL kolinlamil Jakarta. Hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa komunikasi antara agen pelaksana baik dari tingkat Mabes TNI (Pusbintel TNI) tingkat Angkatan (Subdisbintel Diswatpersal Mabelal) maupun tingkat Kotama Komando Lintas LAut Militer Jakarta (Subdisbintel disminpes Kolinlamil) sudah berjalan dengan baik, tujuan dan sasaran kebijakan implementasi bintel fungsi komando ini disampaikan oleh kasubdisbintel diswatpersal mabelal sehingga tidak menghambat jalannya implementasi, dengan diterbitkannya telegram (ST) yang berkaitan dengan kegiatan Bintel Fungsi Komando dan dilakukan koordinasi berupa rapat

³² Donald Van Horn, Carl Van Meter, "The Policy Implementation. Process: A Conceptual

Framework, Administration and Society", Vol 6, No. 4 2008 hlm xxx-xxx

koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait.

b. Sumber Daya

Keberhasilan sebuah proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi. Tahap-tahap tertentu dari keseluruhan proses implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas, selain dari sumber daya manusia sumber daya lain yang tidak kalah pentingnya adalah sumber daya waktu dan sumber daya finansial.³³

menjelaskan tentang sumber daya, menurut Edward sumber daya yaitu, menunjuk setiap kebijakan harus didukung oleh sumber daya yang memadai, baik sumber daya manusia maupun sumber daya finansial.

Sumber daya manusia adalah kecukupan baik secara kualitas maupun kuantitas implementor yang dapat melingkupi seluruh kelompok sasaran, sumber daya finansial adalah kecukupan model investasi atas sebuah program/kebijakan keduanya harus

diperhatikan dalam implementasi program/kebijakan pembinaan mental TNI/TNI AL. sebab tanpa kehandalan implementor sebuah kebijakan, maka akan menjadi kurang energik serta berjalan lambat dan terkesan seadanya. Hasil penelitian di lapangan, sumber daya menjadi faktor penghambat dari implementasi bintal fungsi komando terlihat dari animo personel yang mengikuti Penataran Bintal Fungsi Komando yang sangat kurang diminati, padahal peran para atasan atau komandan atau kasatker sangat berpengaruh terhadap mental dan moral prajurit terutama dalam mendukung pencegahan terhadap paham radikalisme dilingkungan TNI/TNI AL, dalam implementasi pelaksanaan program terkesan seadanya atau dalam istilah lain yang penting terlaksana, sehingga *output* dari program tersebut sangat kurang bagi organisasi.

Peneliti menyarankan agar dikaji kembali tentang implementasi program penataran bintal fungsi komando dengan lebih dioptimalkan dan penegasan dari tingkat pusat akan pentingnya program tersebut dengan menyetarakan Tar BFK setingkat SUS, atau pelaksanaan program

³³ Donald Van and Horn, Carl Van Meter, "The Policy Implementation. Process: A Conceptual

Framework, Administration and Society", Vol 6, No. 4 2008 hlm xxx-xxx

Tar BFK bisa dilaksanakan oleh satuan masing – masing/ setiap angkatan agar lebih memudahkan dalam keikutsertaan para prajurit terutama para perwira dalam mengikuti program Tar BFK sehingga dilaksanakan secara mandiri oleh setiap Angkatan baik TNI AD, TNI AL dan TNI AU. Untuk TNI AL sebagai Implementor nya adalah Subdisbint al Diswatpersal Mabesal.

c. Karakteristik Agen Pelaksana/
Kecenderungan Agen Pelaksana

Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Leo Agustino (2008: 142) pusat perhatian pada agen pelaksana dibagi menjadi dua yaitu organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat dalam pengimplementasian kebijakan public. Hal ini sangat penting karena kinerja implementasi sebuah kebijakan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan agen pelaksananya. Selain itu, cakupan atau luas wilayah implementasi perlu juga diperhitungkan manakala hendak menentukan agen pelaksana. Hasil penelitian, peneliti memiliki saran agar pelaksanaan program penataran bintal fungsi komando dapat didelegasikan implementasinya kesetiap angkatan guna mempermudah dan memperlancar keberhasilan sebuah program agar

tercapai sasaran dan tujuan secara maksimal.

d. Komitmen Agen Pelaksana dan
Tingkat Konsistensi

C.Edward III dalam Leo Agustino (2008) mengemukakan bahwa disposisi, menunjukkan karakteristik yang menempel erat kepada implementor kebijakan/program. Karakter yang penting dimiliki oleh implementor adalah komitmen, demokrasi dan kejujuran. Implementor yang memiliki komitmen tinggi dan jujur maka, akan senantiasa antusias dalam melaksanakan tahap-tahap program secara konsisten.

Hasil penelitian yang telah dilakukan di lapangan, dinas administrasi personel Komando Lintas Laut Militer Jakarta dalam hal ini subdisbintal disminpers Kolinlamil sudah konsisten dalam melaksanakan setiap kebijakan atau program dari Subdisbintal Diswatpersal Mabesal, komitmen subdisbintal Komando Lintas Laut Militer terhadap program kebijakan sudah cukup tinggi terlihat dengan program yang sudah terencana dan terlaksana dengan baik dari semua program yang direncanakan mulai dari TW I sampai dengan TW IV yang kesemuanya mengacu kepada kebijakan program dari subdisbintal diswatpersal mabesal.

Implementasi komitmen yang di bangun dan di laksanakan oleh subdisbintal Komando Lintas Laut Militer Jakarta masih kurang di barengi dengan komitmen masing masing satuan yang ada di lingkungan komando lintas laut militer Jakarta terlihat dari masih kurangnya para personel termasuk para perwira dalam mengikuti kegiatan keagamaan yang rutin dilaksanakan di satuan Kolinlamil Jakarta.

Maka perlu optimalisasi peran atasan atau komandan atau kasatker dalam mendukung dan menjadi implementor dari setiap kegiatan keagamaan yang di programkan di satuan kolinlamil agar tercapai sasaran dan tujuan dari program tersebut sesuai dengan Fungsi Komando masing-masing satuan kerja guna mendukung pencegahan paham radikalisme di kalangan prajurit.

Peneliti dapat menyimpulkan bahwa meskipun implementor dalam hal ini subdisbintal disminpers kolinlamil berkomitmen dalam melakukan kebijakan, akan tetapi apabila tidak ada dukungan secara maksimal dari masing-masing satuan kerja dalam hal ini para Komandan atau kasatker sebagai binntal fungsi komando maka akan sulit mengimplementasikan kebijakan

tersebut secara maksimal, untuk itu diperlukan komitmen yang kuat dari pembuat kebijakan dan juga agen pelaksana sehingga implementasi kebijakan atau program dapat berjalan dengan baik dan dapat tercapainya sasaran dan tujuan yang telah di tetapkan guna ikut serta dalam pencegahan paham radikalisme di lingkungan Kolinlamil Jakarta.

e. Tingkat Demokratis Agen Pelaksana

C.Edward dalam Leo Agustino (2008) mengatakan bahwa sikap yang demokratis akan meningkatkan kesan baik Implementor dan kebijakan yang dihadapkan anggota kelompok sasaran, sikap tersebut akan menimbulkan resistensi dari masyarakat dan menumbuhkan rasa percaya diri dan kepedulian kelompok sasaran terhadap implementor dan program/kebijakan.

Hasil wawancara yang telah di laksanakan dalam hasil penelitian, tingkat demokratis Subdisbintal Dismipers Komando Lintas Laut Militer Jakarta sudah bagus, dilihat dari di laksanakannya program konsling bagi anggota atau prajurit kolinlamil sebagai implementor serta sering melakukan sharing dengan kelompok kelompok sasaran dalam bentuk mentoring atau yang dikenal

dengan istilah zee zoon mentor, selalu ada komunikasi dengan kelompok sasaran akan membuat suatu kebijakan atau program dapat berjalan dengan baik.

f. Sikap/Kecenderungan
(Disposisi) Para Agen
Pelaksana

sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi terhadap keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan atau program, hal ini sangat mungkin terjadi oleh karena kebijakan yang dibuat tidak mengakomodir sebuah permasalahan yang di rasakan. Implementasi kebijakan atau program pembinaan mental fungsi komando sangat perlu untuk dilaksanakan secara berkesinambungan dan berkelanjutan, akan tetapi dalam pelaksanaannya agar tidak beranggapan bahwa penataran bintal fungsi komando akan menjadikan personel atau perwira tersebut akan dijadikan perwira rohani maka, perlu sosialisasi dari program tersebut, sehingga peran para perwira sebagai Pembina mental fungsi komando akan sangat memahami akan pentingnya kebijakan atau program tersebut guna menjadi bagian dari implementor atau agen dalam turut serta mencegah paham radikalisme dikalangan prajurit, meskipun

dalam realisasinya bukanlah hal yang mudah. Menganalisis faktor pendukung dan faktor penghambat implementasi Bintal Fungsi Komando dalam mendukung pencegahan paham radikalisme di lingkungan TNI AL dalam hal ini komando lintas laut militer Jakarta peneliti menggunakan teori Van Meter dan Van Horn, tetapi seiring dengan berjalannya penelitian dilapangan teori yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn belum dapat menjawab keseluruhan dari pertanyaan mengenai sukses atau tidaknya suatu program/kebijakan, ternyata ada faktor lain diluar faktor kebijakan yang mempengaruhi proses implementasi yaitu faktor Sosial dan lingkungan. Implementasi sebuah kebijakan seharusnya tidak selalu fokus pada seputar agen pelaksana maupun birokrasinya, tetapi juga ada faktor eksternal seperti faktor sosial dan lingkungan maupun teknologi yang perlu diperhatikan secara serius, untuk itu peneliti menambahkan dari teori Van Meter dan Van Horn yang mengungkapkan bahwa terdapat enam variabel yang mempengaruhi kinerja kebijakan publik, salah satu implementasinya adalah sosial dan lingkungan eksternal kebijakan. Untuk itu

peneliti menambahkan faktor kondisi sosial dan lingkungan dalam menganalisis factor-faktor yang mendukung dan menghambat implementasi kebijakan Bintel fungsi komando dalam mendukung pencegahan paham radikalisme di lingkungan TNI AL Komando lintas laut militer Jakarta.

Hasil penelitian di dapat bahwa salah satu faktor penghambat implementasi pembinaan mental fungsi komando adalah Mindset dari prajurit atau personel atau perwira yang masih berpandangan bahwa tugas pembinaan mental hanya di lakukan oleh Pabintel atau Paroh atau Rohaniawan saja, padahal sesuai dengan fungsi komando para komandan/kasatker mempunyai kewajiban sebagai implementor dari program atau kebijakan pembinaan mental. Termasuk program atau kebijakan pelaksanaan penataran bintel fungsi komando yang di laksanakan oleh pusat pembinaan mental TNI kurang diminati karena masih berfikir bahwa kalau seorang perwira mengikuti penataran bintel fungsi komando maka nantinya di jadikan Paroh atau perwira rohani, padahal tidak demikian adanya.

Sumber daya Manusia (Pengawak Pembina mental) yang sangat minim menjadikan salah satu faktor

penghambat implementasi program atau kebijakan pembinaan mental fungsi komando, maka perlu adanya penambahan perwira bintel disatuan-satuan KRI atau kapal perang sebagai agen dari fungsi pembinaan mental disatuan serta keterlibatan para Komandan atau kasatker sebagai fungsi komando pembinaan mental di satuan juga sebagai agen dari implementor program atau kebijakan pmbinaan mental fungsi komando.

Implementasi kegiatan pembinaan mental fungsi komando secara struktural di satuan komando lintas laut militer Jakarta merupakan bagian dari Dinas Administrasi Personel (Disminpers) komando lintas laut militer yaitu Subdis Bintel, program kegiatan bintel di susun berdasarkan fungsi organisasi dan prosedur komando lintas laut militer Jakarta dan harus di pertanggung jawabkan secara struktural oleh pejabat personel yaitu Kadisminpers komando lintas kaut militer Jakarta kepada Aspers Pangkolinlamil Jakarta.

Secara teknis program kegiatan Bintel di lingkungan TNI Angkatan Laut disusun oleh Subdisbintel Diswatpersal Mabasal dan dikirim ke semua satuan yang ada di jajaran TNI Angkatan Laut, termasuk Komando Lintas Laut Militer

Jakarta untuk di jadikan dasar dalam membuat program kegiatan dan pelaksanaannya. Sebagaimana yang di kemukakan oleh Perwira Rohani Islam yang berdinasi di Kolinlamil Jakarta bagian Dinas Perawatan Personel kolinlamil Jakarta Mayor laut (KH) Latief Wibawa “pembinaan mental secara umum di Komando Lintas Laut Militer Jakarta, pada dasarnya berpedoman kepada aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Subdisbintal Diswatpersal Mabesal, dimana setiap tahunnya akan dikeluarkan telegram sistem pembinaan Mental di jajaran TNI AL

Realisasi Program Kegiatan Pembinaan Mental Fungsi Komando Wewenang dan tanggung jawab pelaksanaan pembinaan mental di setiap tingkat kepemimpinan di lingkungan TNI, berada di tangan pemegang komando pada setiap tingkatan. Untuk membantu pemegang Komando dalam melaksanakan pembinaan mental, maka setiap tingkatan komando tersebut ada bagian yang diberi wewenang dan tanggung jawab sebagai pelaksana teknis pembinaan mental. Implementasi kegiatan pembinaan mental yang dilaksanakan di Komando Lintas Laut Militer Jakarta secara umum sudah dapat terlaksana dengan baik, dari agenda

tahunan yang di tuangkan dalam program setiap tri wulannya, akan tetapi peneliti melihat masih kurangnya minat dari personel atau anggota dalam setiap pelaksanaan kegiatan pembinaan mental di lingkungan kolinlamil, oleh karenanya peran para Komandan atau Kasatker sangat berpengaruh besar terhadap keberhasilan dari program kegiatan yang sudah di rencanakan baik itu TW I sampai dengan TW IV dari program kegiatan pembinaan mental di satuan kolinlamil Jakarta.

Pelanggaran yang di lakukan oleh personel atau anggota masih ada di lingkungan kolinlamil bahkan cenderung meningkat seperti LGBT dan indiscipliner lainnya sesuai dengan data pelanggaran yang ada.

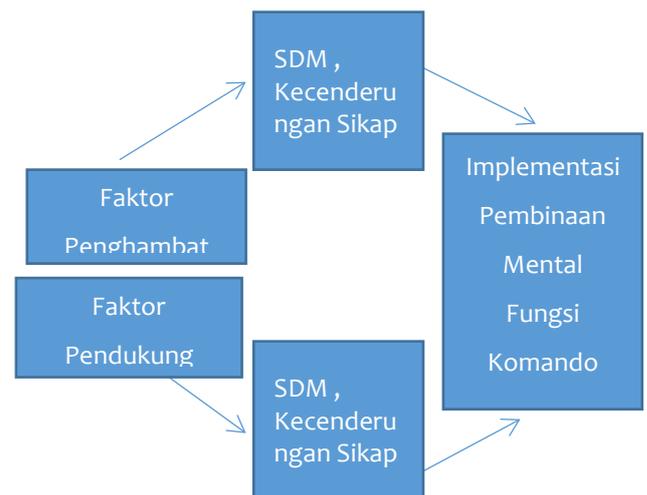
Peneliti tidak menemukan satu pelanggaran yang di lakukan oleh prajurit atau anggota kolinlamil yang berkaitan dengan terpaparnya paham radikalisme, namun demikian peneliti menyarankan untuk lebih optimal lagi di dalam pelaksanaan pembinaan mental yang bersifat fungsi komando dimana peran atasan atau komandan yang melekat dengan anggota sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pembinaan mental, kepedulian dan kepekaan para kasatker atau komandan sangat penting

guna cegah dini dari kemungkinan adanya anggota yang terpapar paham radikalisme karena akan sangat berpengaruh terhadap tugas pokok TNI di kolinlamil dalam mendukung pertahanan laut.

Implementasi Bintal Fungsi Komando dalam mendukung pencegahan paham radikalisme di lingkungan TNI AL kolinlamil Jakarta peneliti menggunakan teori Van Meter dan Van Horn dalam mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat implementasi

Enam panduan pertanyaan dari teori Van Meter dan Van Horn dalam teori kebijakan diantaranya adalah, pertama, bagaimana hubungan antar organisasi, kedua, bagaimana pelaksanaan program, ketiga, bagaimana sumber daya (SDM), ke empat, bagaimana kecenderungan atau sikap, ke lima, bagaimana tingkat demokratis agen pelaksana, ke enam, komitmen agen pelaksana dan tingkat konsistensi.

Hasil penelitian melalui wawancara dan dokumentasi maka didapat faktor yang mendukung dan menghambat dari implementasi pembinaan mental fungsi komando dalam mendukung pencegahan paham radikalisme sebagai berikut:



Gambar 4. Hasil Penelitian Wawancara
 Sumber: Diolah Peneliti, 2019

Faktor penghambat dalam pelaksanaan implementasi pembinaan mental fungsi komando adalah Sumber daya Manusia (Pengawak Pembina mental) yang sangat minim menjadikan salah satu faktor penghambat implementasi program atau kebijakan pembinaan mental fungsi komando, maka perlu adanya penambahan perwira bintal di satuan-satuan KRI atau kapal perang sebagai agen dari fungsi pembinaan mental di satuan serta keterlibatan para Komandan atau kasatker sebagai fungsi komando pembinaan mental di satuan juga sebagai agen dari implementor program atau kebijakan pembinaan mental fungsi komando.

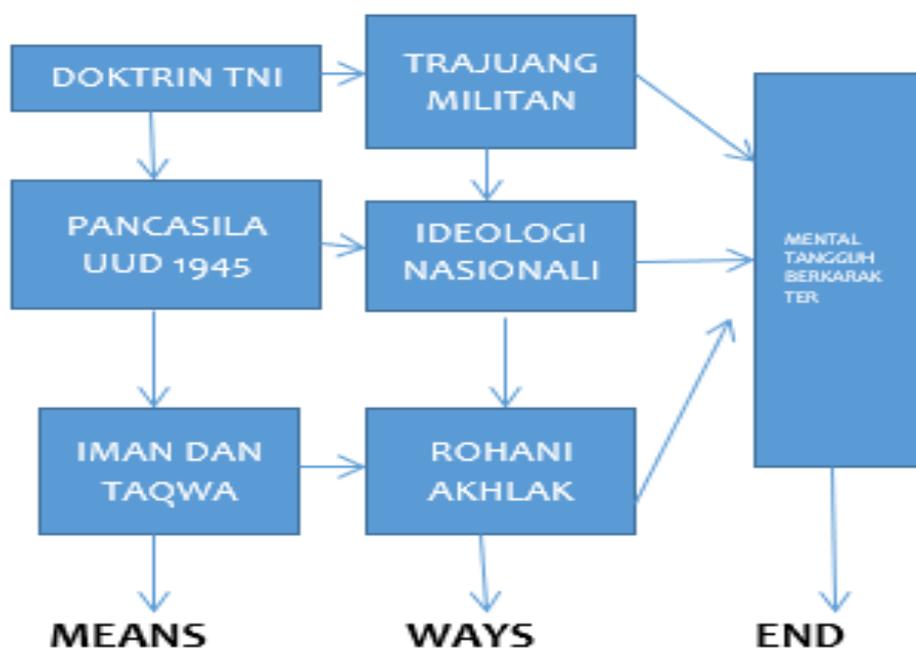
Kepekaan dan kepedulian para kasatker atau komandan akan sangat berpengaruh terhadap program kegiatan

pembinaan mental, di samping sebagai fungsi kontrol bagi anggota di bawahnya guna lebih mengetahui pribadi dari setiap anggotanya terlebih para komandan atau kasatker merupakan agen dalam keikutsertaannya dalam pencegahan pemahaman paham radikalisme di satuannya, agar tidak ada anggotanya atau prajuritnya yang terpapar pemahaman paham radikalisme.

Hasil penelitian di dapat bahwa salah satu faktor penghambat implementasi pembinaan mental fungsi komando adalah *Mindset* dari prajurit atau personel atau perwira yang masih berpandangan bahwa tugas pembinaan mental hanya dilakukan oleh Pabintal atau Paroh atau Rohaniawan saja,

padahal sesuai dengan fungsi komando para komandan atau kasatker mempunyai kewajiban sebagai implementor dari program atau kebijakan pembinaan mental. Termasuk program atau kebijakan pelaksanaan penataran bintal fungsi komando yang di laksanakan oleh pusat pembinaan mental TNI kurang diminati karena masih berfikiran bahwa kalau seorang perwira mengikuti penataran bintal fungsi komando maka nantinya di jadikan Paroh atau perwira rohani, padahal tidak demikian adanya.

Implementasi sebuah kebijakan seharusnya tidak selalu fokus pada seputar agen pelaksana maupun birokrasinya, tetapi juga ada faktor eksternal seperti faktor sosial dan



Gambar 5. Rumusan dan Strategi Pembinaan Mental
 Sumber: Diolah Penulis, 2019

Tabel 3. Upaya – Upaya dalam Meningkatkan Peran Binal Fungsi Komando dalam Pencegahan Paham Radikalisme

End/Tujuan	Means/Sarana	Ways/Upaya
Terlaksananya satu program kebijakan bintal fungsi komando secara optimal	Doktrin TNI Pinaka baladika Pusbintal	Mensosialisasikan lebih intens tentang program penataran Bintal fungsi komando
Terpenuhinya DSP pengawak organisasi pembinaan mental di satuan	Satuan pendirat dan disatuan KRI	Penerimaan calon prajurit yang mempunyai kualifikasi/propesi dalam bidang ke agamaan
Terpeliharanya konsistensi idiologi bagi prajurit dari pengaruh paham radikalisme	Optimalisasi media konsling Test mental ideology secara berkala dan berkelanjutan	Sinegritas kegiatan dengan BPIP badan pemantapan ideology pancasila Tar bintal fungsi komando dilaksanakan disatuan masing-masing (per matra)
Terbentuknya mental prajurit yang bertaqwa terhadap keyakinannya serta berkarakter	Pelaksanaan pembinaan mental rohani, mental idiologi dan mental tradisi kejuangan	Menekankan kembali PHST perintah harian sifat tetap dan PKST perintah komandan bersifat tetap dilingkungan satuan
Terpeliharanya doktrin Tri Sila angkatan laut dalam kehidupan prajurit	Melaksanakan bulan trisila secara berkelanjutan dan menjadi agenda tahunan bagi matra laut	mplementor masing masing satuan untuk melaksanakan serta mengawasi stiap kegiatan bulan trisila disatuan masing – masing

Sumber: Diolah Penulis, 2019

lingkungan maupun teknologi yang perlu diperhatikan secara serius, untuk itu peneliti menambahkan dari teori Van Meter dan Van Horn yang mengungkapkan bahwa terdapat enam variabel yang mempengaruhi kinerja kebijakan public, salah satu implementasinya adalah sosial dan lingkungan eksternal kebijakan. Untuk itu peneliti menambahkan factor kondisi sosial dan lingkungan dalam menganalisis factor-faktor yang mendukung dan menghambat implementasi kebijakan Bintal fungsi komando dalam mendukung pencegahan paham radikalisme

dilingkungan TNI AL/ Komando lintas laut militer Jakarta.

Kesimpulan Rekomendasi dan Pembatasan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat diambil beberapa kesimpulan dan rekomendasi mengenai Implementasi Bintal Fungsi Komando dalam mendukung pencegahan paham radikalisme dilingkungan TNI AL Komando Lintas Laut Militer Jakarta.

- a. Optimasi dari Implementasi pembinaan mental fungsi komando yang dilaksanakan komando lintas laut militer

Jakarta secara umum sudah berjalan dengan baik, tetapi masih ada hal-hal yang harus di benahi di dalam setiap pelaksanaan pembinaan mental yang di laksanakan seperti peran dan kepedulian para komandan atau kasatker dalam memerintahkan anggotanya untuk ikut serta dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan mental

- b. Pelaksanaan optimasi pembinaan mental fungsi komando yang di laksanakan terdapat beberapa faktor pendukung dan penghambat di dalam implementasinya, sesuai dengan model implementasi Van Meter dan Van Horn, faktor penghambat di antaranya adalah Sumber daya manusia (SDM) kurangnya minat dari prajurit dalam kegiatan pembinaan mental fungsi komando, kurangnya minat prajurit didalam mengikuti penataran pembinaan mental fungsi komando (Tar Bintal Fungsi Komando) yang di selenggarakan oleh pusbintal TNI, kurangnya personel

pengawak Bintal (Pembina mental) di satuan baik di pendirat maupun di unsur KRI sehingga perlu adanya penambahan perwira bintal terutama di unsur KRI, faktor yang mendukung dari implmentasi pembinaan mental fungsi komando di antaranya adalah komunikasi antar lembaga/aktivis, tingkat demokratis, komitmen dan karakteristik dari kebijakan implementasi pembinaan mental fungsi komando

- c. Upaya yang di lakukan atau strategi terbaik dalam mendukung kebijakan implementasi pembinaan mental fungsi komando dalam mendukung pencegahan paham radikalisme di lingkungan TNI AL komando lintas laut militer jakarta adalah mensosialisasikan kembali tentang pentingnya pembinaan mental fungsi komando di satuan dengan peran para komandan satuan, para kasatker dalam pembinaan mental rohani, ideologi dan tradisi kejuangan, mengikutsertakan para

komandan satuan atau kasatker dalam penataran bintal fungsi komando yang di selenggarakan oleh Pusbintal TNI.(Pusat Pembinaan Mental TNI) guna mendukung dalam upaya pencegahan paham radikalisme di satuannya masing-masing terutama di satuan komando lintas laut militer Jakarta terutama di satuan unsur KRI.

Kemudian rekomendasi yang dapatpeneliti sampaikan dalam penelitian ini yaitu:

- a. Perkuatan personel pengawak Pembina mental sesuai dengan agama yang diakui di Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu Pembina mental rohani Islam, Pembina mental rohani Kristen ktholik protestan, Pembina mental rohani Hindu dan Budha dan Pembina mental rohani konghucu, terutama di unsur KRI
- b. Implementasi dari kegiatan penataran pembinaan mental fungsi komando implementornya adalah dari matra masing masing baik TNI AD, AL, AU jadi unsur pelaksana dari program kegiatan

penataran pembinaan mental fungsi komando dalam pelaksanaannya di laksanakan oleh matra masing masing.

- c. Bagi para calon komandan atau kasatker sebelum menduduki jabatan Komandan atau kasatker agar di ikutsetakan dalam penataran pembinaan mental fungsi komando sebagai fungsi komando yang nantinya akan berpengaruh terhadap satuan yang dipimpinnya, dan menjadi bagian penting terhadap peran sebagai pimpinan dalam pencegahan terhadap paham radikalisme disatuannya.

Daftar Pustaka

Buku

Hoetomo (2005) *Kamus Lengkap Inggris – Indonesia, Indoesia – Inggris*

Moleong, Lexy (2009) *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Bandung: Remaja Rosdakarya

Sugiyono (2016) *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)* Bandung: Alfabeta

Jurnal

Asmaroini, Amairo. "Menjaga Eksistensi Pancasila Dan Penerapannya Bagi Masyarakat di Era Globalisasi", JPK: Jurnal Pancasila dan

Kewarganegaraan vol. 1, 2017, hlm 50-64

Hendropriyono, Abdullah “Terorisme: Fundamentalisme Kristen, Yahudi dan Islam”. 2009

Horn, Donald van, Meter, Carl van, “The Policy Implementation. Process: A Conceptual Framework, Administration and Society”, Vol 6, No. 4 2008 hlm xxx-xxx

Susanto, Luki. “Faktor-faktor penyebab rendahnya pemahaman nilai-nilai sumpah pemuda”. 2015

Zuhdi, Susanto. Sejarah Perjuangan Bangsa sebagai Modalitas Memperkuat Pertahanan Negara. *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, Vol 4 No.1. 2018

Undang – Undang dan Peraturan

Peraturan Presiden No 10 Tahun 2010 Pasal 132

Peraturan Presiden No 10 Tahun 2010 Pasal 53

Peraturan Presiden RI Nomor 10 Tahun 2010 Pasal 53

Undang - Undang RI Nomor 34 tahun 2004 pasal 16

Undang - Undang RI Nomor 34 tahun 2004 pasal 21

Undang – Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI

Surat Keputusan

Instruksi Kasal No.28/71 TW. 230204 Z/APR/1971 dan instruksi Komandan Kolinlamil Nomor: 02/INTR/KOLINLAMIL/V/1971, tanggal 4 mei 1971.

Keputusan Kasal Nomor Kep/45.a/VII/1997 tanggal 22 Juli 2005 tentang Pokok-pokok Organisasi dan Prosedur Kolinlamil beserta perubahannya

Keputusan Kasal Nomor: Skep/1636/XI/2006, tanggal 9 november 2006.

Keputusan Panglima TNI Nomor: Kep/22/VIII/2005, tanggal 10 agustus 2005

Skep Menhankam Pangab tentang pokok-pokok Organisasi dan Prosedur ALRI Nomor: Kep/A/39/VI tahun 1971.tanggal 23 juli 1971, Laut Militer (DALMIL).

Surat Panglima TNI No. B/583-08/13/12/SRU tanggal 19 maret 2003 dan Telegram Kasal No:014/SPREN/03.03 TWU.0325 1420.

Telegram Kasal Nomor 060/SREN/0510 TWU 0508.1816 tentang beberapa tugas Kotama (Komando Utama) di jajaran TNI AL

Thoha, Mitha (1989) *Pembinaan Organisasi Proses Diagnosa dan Intervensi Rajawali*

Lain-lain

Wawancara dengan Menteri Agama RI bapak Fahrurrozy, Jakarta oktober 2019